



# Serapan Anggaran Baru Mencapai 36,9 Persen

## ► Dirut PAM Jaya Beri Penjelasan di DPRD

### Gambir, Warta Kota

Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat monitoring alokasi Penyertaan Modal Daerah (PMD) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Rabu (14/9/2022).

Terdapat dua agenda dalam rapat bersama BUMD itu, yakni rapat monitoring alokasi PMD BUMD 2022 dan monitoring pengajuan PMD BUMD tahun 2022 untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023.

Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa serapan anggaran penyertaan modal daerah (PMD) Perumda Air Minum (PAM) Jaya masih sangat rendah. Yaitu baru hanya mencapai 36,9 persen.

Direktur PAM Jaya, Arief Nasrudin, mengakui serapan PMD dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2022 baru mencapai 36,9 persen.

Arief mengatakan, PMD untuk PAM Jaya pada 2022 sebenarnya mencapai Rp 1,54 triliun. "Ini ada uang atau PMD yang sudah digelontorkan oleh Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 1,54 triliun, di mana realisasinya 36,9 persen atau angkanya Rp 418 miliar," ujar Ari, saat rapat.

### Hambatan

Menurut Arief, penyerapan anggaran masih tergolong kecil karena pembangunan pipa di daerah Pesanggrahan, Jakarta Selatan, terhambat.

Ia menyebutkan, pembangunan pipa sejatinya merupakan proyek multiyear periode 2019-2022.

Proyek itu memakan anggaran hingga Rp 400 miliar. Namun, kata Arief, masih ada sisa anggaran sebesar Rp 357 miliar.

Ratusan miliar itu tersisa lantaran pembangunannya belum berlanjut. "Itu besaran anggarannya (pembangunan pipa Pesanggrahan) mencapai Rp 357 miliar, yang belum dikerjakan," sebutnya.

Ia menyatakan, pembangunan pipa di Pesanggrahan itu merupakan kewenangan dari mitra swasta PAM Jaya, yakni Palyja atau

*Ini ada uang atau PMD yang sudah digelontorkan oleh Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 1,54 triliun, di mana realisasinya 36,9 persen atau angkanya Rp 418 miliar.*

**Direktur PAM Jaya**  
Arief Nasrudin

Aetra.

"Itu seharusnya dikembangkan oleh mitra, Palyja atau Aetra," katanya.

Karena itu, lanjut Arief, PAM Jaya tak bisa membangun pipa di Pesanggrahan. PAM Jaya pun tak bisa memaksa membangun pipa di sana karena tumpang tindih teritorial.

"Sehingga persetujuan ini tidak bisa didapatkan begitu saja oleh PAM Jaya kepada mitra kami," ungkapnya.

Rapat yang digelar Komisi B DPRD DKI ini beragendakan monitoring alokasi PMD kepada BUMD tahun 2022.

Agenda kedua adalah monitoring pengajuan PMD oleh BUMD pada tahun 2022 untuk APBD tahun 2023.

Selain PAM Jaya, beberapa BUMD lain yang juga turut hadir adalah Perumda Pembangunan Sarana Jaya, PT MRT Jakarta, Perumda PAL Jaya.

Lalu, PT Jakarta Tourisindo (Jaktour), PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Asuransi Bangun Askrida, PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung, dan Perusahaan Daerah Dharma Jaya.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail. (m35/Kompas.com)